

3.1.1.5.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Trantibumlinmas dilaksanakan oleh Badan Penanggulanngan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran Rp.12.742.506.541,00 dengan realisasi keuangan Rp.12.188.017.501,00 (95,64%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Urusan tersebut dilaksanakan melalui Dua Program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	79	70.44	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	88	93,5	106,25%
3	Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	29	29	100%
			2. Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	20	23	115%
4	Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%)	100	100	100%
			2. Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan (%)	100	100	100%

2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

a. Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan capaian kinerja 89,16%. Capaian kinerja yang dicapai masih dibawah 90% dikarenakan beberapa hal antara lain:
 1. Pemantauan capaian kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, belum adanya pembahasan kinerja secara mendalam dan belum sepenuhnya memberikan saran untuk perbaikan kinerja.

2. Teknologi Informasi yang digunakan dalam pemantauan kinerja sampai dengan level staf masih belum terintegrasi dengan baik.
3. Belum seluruhnya rekomendasi evaluasi AKIP ditindaklanjuti.
4. Hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan, efisiensi dan efektivitas kinerja.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi target 100%, realisasi 100% dan capaian 100 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPBD, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output kegiatan ini jumlah dokumen evaluasi yang disusun, sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output kegiatan ini adalah Gaji dan Tunjangan ASN BPBD untuk satu tahun yang dianggarkan 38 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan honor, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

b. **Sasaran II** : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Target kinerja: 88) (Realisasi Kinerja : 93,5) dengan capaian kinerja 106,25%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan outcome Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi target 100%, realisasi 100% dan capaian 100 %. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:

(1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD yang disusun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- Sub kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

(2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak ada undangan pemanggilan peserta terkait Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- Sub kegiatan bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya undangan pemanggilan peserta terkait sub kegiatan yang dimaksud.

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru 3 unit/set jenis, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan ini adalah Jumlah surat – surat masuk dan surat – surat keluar dalam 1 tahun, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan 100 mbps, Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 2 rekening, Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan 12 bulan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 1375 KVA, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan ini adalah jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

- c. **Sasaran III** : Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota) (Target kinerja : 29), (Realisasi Kinerja : 29) dengan capaian kinerja 100 %.
- 2) Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit) (Target kinerja: 20) (Realisasi Kinerja: 23). dengan capaian kinerja 125 %.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penanggulangan Bencana, dengan outcome Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan target 72%, realisasi 72% dan capaian 100%. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan sub kegiatan:
 - Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan output kegiatan ini adalah Pelatihan kebencanaan bagi relawan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan output kegiatan ini adalah Petugas PUSDALOPS PB yang difasilitasi 12 bulan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan output kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana (peralatan perlindungan, EWS Tsunami/Letusan gunung api/banjir/longsor) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan output kegiatan ini Pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di kabupaten/kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan output kegiatan ini adalah Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan 1 kali, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

d. Sasaran IV : Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana

- 1) Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%) (Target kinerja: 100) (Realisasi Kinerja: 100). dengan capaian kinerja 100 %.
- 2) Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan (%) (Target kinerja: 100) (Realisasi Kinerja: 100). dengan capaian kinerja 100 %.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan

a) Program Penanggulangan Bencana, dengan outcome Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan target 72%, realisasi 72% dan capaian 100%. Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan:

(1) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan:

- Sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana dengan output kegiatan ini adalah Penanganan darurat bencana secara terpadu yang dikoordinasikan 1 laporan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang disusun sebanyak 1 laporan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

(2) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan:

- Sub kegiatan Penanganan Pasca bencana Provinsi dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen jitu pasna provinsi yang disusun sebanyak 1 dokumen dan monitoring serta evaluasi terhadap capaian jitu pasna sebanyak 1 laporan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran IV.

3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran.

No	Program/Kegiatan	Target Capaian	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				12,742,506,541	12.187.597.501	95,65
I.I	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				12,742,506,541	12,187,597,501	95.65
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	8,962,506,541	8,509,297,871	94.94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85%	85%	100%	93,217,400	88,057,854	94.47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	73,372,000	69,113,054	94.2
		6 dokumen	6 dokumen				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	9,926,000	9,814,600	98.88
		4 dokumen	4 dokumen				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9,919,400	9,130,200	92.04
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6,156,359,608	5,775,738,885	93.82
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	38 orang	100%	5,976.099.608	5.597.128.755	93.66
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	175,260,000	173,610,300	99.06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	5,000,000	4,999,800	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	35,018,160	32,252,580	92.1
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1,500,000	1,491,600	99.44
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7,348,160	5,499,780	74.85

No	Program/Kegiatan	Target Capaian	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26,170,000	25,261,200	96.53
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	59,832,000	58,422,000	97.64
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 orang	1 orang	100%	58,422,000	58,422,000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100%	1,410,000	0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	511,853,448	498,764,423	97.44
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	62 unit/buah	62 unit/buah	100%	4,993,100	4,991,400	99.97
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55 unit/buah	55 unit/buah	100%	6,300,000	6,300,000	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	714 unit/buah	714 unit/buah	100%	16,783,200	16,783,100	100
		10 kali	10 kali				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12244 lembar	12244 lembar	100%	4,860,000	4,160,000	85.6
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 dokumen	1 dokumen	100%	13,612,800	12,407,000	91.14
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38,027,118	37,698,700	99.14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				427,277,230	416,424,223	97.46

No	Program/Kegiatan	Target Capaian	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	51,401,840	50,400,000	98.05
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit/ set	4 unit/ set	100%	51,401,840	50,400,000	98.05
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1,225,168,147	1,181,551,702	96.44
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 surat	750 surat	100%	3,000,000	3,000,000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.375 KVA	1.375 KVA	100%	226,558,500	200,760,579	88.61
		100 mbps	100 mbps				
		2 rekening	2 rekening				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23 orang	23 orang	100%	995,609,647	977,791,123	98.21
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	829,655,938	824,110,457	99.33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53 unit	53 unit	100%	398,822,938	396,172,057	99.34
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 unit	28 unit	100%	63,835,000	63,538,400	99.54
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	159,998,000	158,405,000	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	207,000,000	205,995,000	99.51
B	Program Penanggulangan Bencana	72%	72%	100%	3,780,000,000	3,678,299,630	97.31
10	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	56%	56%	100%	3,500,000,000	3,409,838,427	97.42
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	10 kali	10 kali	100%	1,100,000,000	1,048,612,971	95.33
		0 kali	0 kali				
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%	1,100,000,000	1,090,469,969	99.13
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 jenis	2 jenis	100%	875,000,000	866,458,000	99.02
		5 kali	5 kali	100%	400,000,000	379,853,787	94.96

No	Program/Kegiatan	Target Capaian	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kali	1 kali				
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2 kali	2 kali	100%	25,000,000	24,443,700	97.77
11	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	76%	76%	100%	150,000,000	145,228,967	96.82
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	1 laporan	100%	150,000,000	145,228,967	96.82
12	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 sistem	1 sistem	100%	130,000,000	123,232,236	94.79
	Penanganan Pascabencana	1 dokumen	1 dokumen	100%	130,000,000	123,232,236	94.79
		1 laporan	1 laporan				
TOTAL							

4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dalam penerapan SPM ditemukan beberapa masalah diantaranya: Kurang sinkronnya data dari dinas terkait mengakibatkan sulitnya proses pengumpulan data dan informasi; kurangnya sarana dan prasarana; kurangnya anggaran untuk operasional penanggulangan bencana; beberapa kabupaten/kota masih belum memiliki dokumen kajian risiko bencana, peta rawan bencana dan rencana kontijensi bencana	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan	Dukungan dan komitmen BPBD serta	

		karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tidak adanya kendala dalam pelaksanaan	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam hal pengiriman aparatur untuk mengikuti undangan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara selektif karena banyak lembaga yang mengundang tidak atau diragukan kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi	Perlu ditingkatkan kerjasama antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi terutama untuk pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kebencanaan.	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tidak adanya kendala dalam pelaksanaan	-	
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tidak adanya kendala dalam pelaksanaan	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tidak adanya kendala dalam pelaksanaan	-	
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat	

		karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
II	Program Penanggulangan Bencana			
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	BPBD kab/kota belum menginisiasi data relawan dilingkungan masing-masing sehingga ketika difasilitasi untuk pelatihan tidak jarang ditemukan relawan yang kurang serius selama kegiatan; Kurangnya koordinasi dan komunikasi serta komitmen antara masyarakat dan BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait PB; Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/ melaksanakan kegiatan.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan hubungan antara BPBD Kabupaten/Kota dengan masyarakat agar kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi hal wajib yang dilakukan secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing; Serta membentuk wadah komunikasi bersama agar inspirasi dan kendala masyarakat dalam bidang kebencanaan dapat terakomodir secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Belum seluruh kabupaten/kota yang membentuk Pusdalops PB sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pendataan, Masih kurangnya Kapasitas personil Pusdalops PB sehingga perlunya pelatihan personil.	Perlunya melakukan pembinaan dan pelatihan personil Pusdalops PB provinsi dan kabupaten/kota serta menghimbau kabupten/kota untuk segera membentuk Pusdalops.	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Hingga periode Laporan Akhir ini bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat	-	

	<p>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p>	<p>Peran serta BPBD Kabupaten/Kota di beberapa nagari penumbuhan DESTANA belum maksimal sehingga dikhawatirkan DESTANA tidak terbentuk dengan optimal; Kurangnya perhatian dan keseriusan beberapa BPBD Kabupaten/Kota terhadap pengembangan kapasitas kelompok di daerah yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan KSB di Kabupaten/Kota; Ada beberapa Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan pembinaan KSB tetapi tidak mendatangkan KSB nya bahkan ada yang belum terbentuk; Peraturan berkaitan dengan pemakaian Dana Desa terkait penanganan bencana masih belum jelas sehingga Nagari/Desa ragu untuk menganggarkannya; Keterbatasan armada transportasi dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan perencanaan, kebijakan, penganggaran dan pelaksanaan dalam meningkatkan hubungan antara kelembagaan kebencanaan daerah dan BPBD Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan sinergi yang baik. Perlu ada ruang komunikasi dan keseriusan OPD BPBD Kab/Kota untuk menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dengan menghasilkan <i>punishment and reward</i> sehingga masyarakat lebih terayomi dalam menghadapi bencana dibawah kewenangan daerah masing-masing; serta Perlu ditingkatkan Monitoring dan Evaluasi dalam memantau perkembangan DESTANA di kabupaten/kota</p>	
	<p>Penanganan Pascabencana Provinsi</p>	<p>Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan dengan maksimal terutama dalam monitoring kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P) sehingga usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi terlambat.</p>	<p>Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasaca bencana dengan anggaran yang tersedia melalui skala prioritas kegiatan; Melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di kabupaten/kota dengan memaksimalkan anggran yang tersedia; Memberikan bimbingan kepada BPBD Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) kepada sumber daya manusia yang ada didaerah</p>	

	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan masih kurang, sehingga gladi hanya dilaksanakan dengan keterlibatan 125 peserta dengan cakupan daerah terdampak jauh lebih luas; Dukungan dari BPBD Kabupaten Solok masih kurang dikarenakan undangan yang diharapkan untuk mengikuti kegiatan tidak hadir pada saat pelaksanaan dan peralatan yang diharapkan juga tidak tersedia; Perlengkapan kesiapsiagaan kebencanaan tidak dalam keadaan optimal sehingga fungsinya tidak dapat ditunjukkan secara langsung dan memerlukan perbaikan; Organisasi masyarakat masih belum bisa diikuti sertakan karena keterbatasan anggaran serta perlunya komitmen dari Forkopinda dalam pelaksanaan Gladi ini.	Perlu adanya rapat koordinasi BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, BNPB dan Forkopinda di Sumatera Barat untuk meningkatkan komitmen baik dalam hal penganggaran, perencanaan program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dalam menangani Bencana tipikal di daerah serta provinsi, agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.	
3	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>			
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Akurasi data sangat kurang di awal masa tanggap darurat. Hal ini disebabkan karena perubahan di lapangan yang sangat dinamis. Koordinasi dan integrasi data sangat sulit atau memerlukan waktu karena pelaku pendataan yang banyak sehingga data tidak terstandar. Disisi lain ego serktoral membuat integrasi data semakin sulit dilaksanakan dan lemahnya koordinasi antar unit/ institusi Pemerintahan, dan juga koordinasi dengan/antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi Kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.	Perlu diperkuat sistem-sistem pada level masyarakat guna percepatan dalam melakukan penanganan darurat bencana antara lain untuk sinkronisasi tim yang akan membantu dalam tugas penanganan pada saat terjadinya bencana, pendistribusian logistik dan pengoperasian peralatan penanggulangan bencana yang bekerja sesuai dengan Prosedur Tetap	